



**RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2023**

RENJA

DISNAKERINTRANS

2023

**DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO**

Jalan T. Jogonegoro No. 83, Wonosobo, Phone: (0286) 321338
Email: disnaker.wonosobo@gmail.com

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) merupakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam satu Tahun dan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu RENJA berfungsi untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Rencana Kerja (Renja) sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo.

Namun demikian dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini kami ucapkan terimakasih.

Wonosobo, Februari 2022

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		i
Daftar isi		ii
Bab I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	4
Bab II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	5
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2021	5
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi	8
	1.1 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	9
	1.2 Hubungan Dengan Dinas/ Instansi Terkait	11
Bab III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	13
	3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	13
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2022	13
	3.3 Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2022	14
	3.4 Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2022	15
Bab IV	PENUTUP	24

BAB I

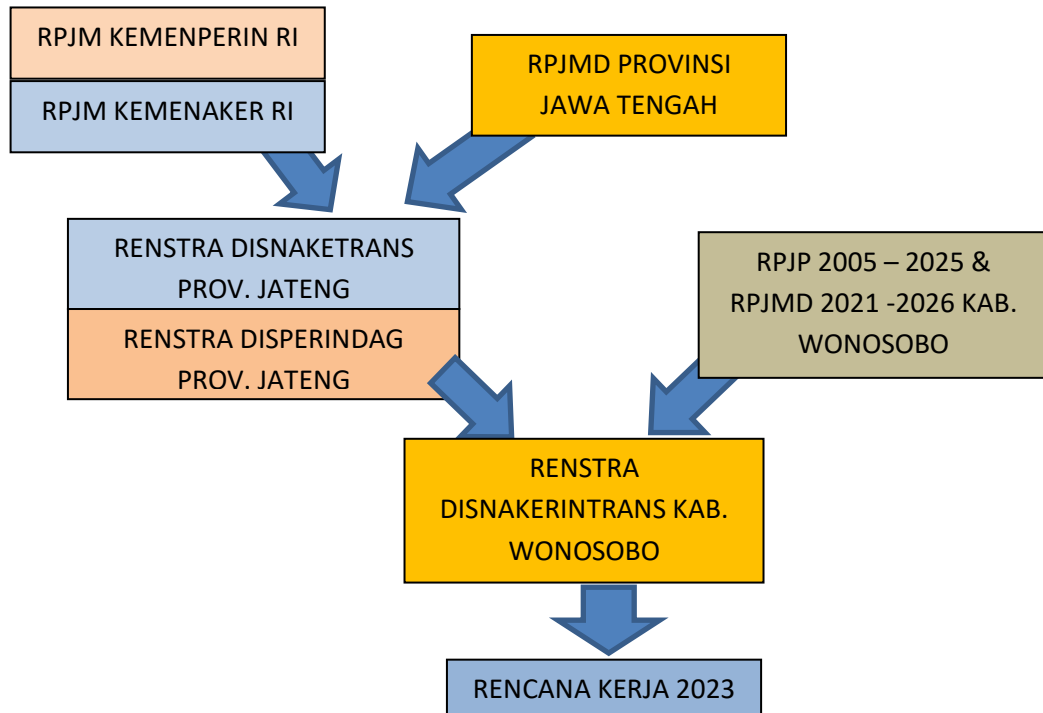
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Ketransmigrasian, strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Wonosobo.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, juga memperhatikan dan mensinergikan dengan RPJM Kementerian Ketenagakerjaan, Perindustrian, dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, RPJM Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan dan Perindustrian.

Hubungan antara antara Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut:



Gambar 1.1 Keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 ini disusun dengan maksud digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2023 yang telah mengakomodir usulan hasil Musrenbang dan Pokok-pokok Pikiran DPRD di Kabupaten Wonosobo.

1.3.2 Tujuan

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 ini disusun dengan tujuan untuk memastikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dalam kurun waktu satu tahun sekaligus indikator pencapaian yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

- Bab 1. Pendahuluan, mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
- Bab 2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2022, mencakup Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun lalu dan Capaian Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- Bab 3. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, meliputi Telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi serta Program dan Kegiatan.
- Bab 4. Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2021

Guna mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo diberikan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.579.812.850 dan terealisasi sejumlah Rp. 8.635.307.778 atau senilai 90,14%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
ANGGARAN DAN REALISASI TA 2021

No	Urusan/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	9.150.056.650	8.504.487.840	92,94
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	3.021.728.000	2.695.688.994	89,21
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.781.728.000	2.462.302.694	88,52
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	240.000.000	233.386.300	97,24
	Pengelolaan Informasi Tenaga Kerja	100.000.000	99.893.552	99,89
	Job Fair/Bursa Kerja	100.000.000	99.893.552	99,89
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	-	-	0,00
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	149.250.000	99,50
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	149.250.000	99,50

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	596.325.000	590.525.853	99,03
		Pemeliharaan Mebel	3.000.000	2.815.000	93,83
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	14.970.000	99,80
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	430.120.000	427.738.000	99,45
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	21.980.091	87,92
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.205.000	123.022.762	99,85
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.682.700	39.606.000	71,13
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.682.700	39.606.000	71,13
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	172.780.000	169.490.880	98,10
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.500.000	3.470.000	63,09
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.500.000	12.496.760	99,97
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.650.000	13.637.000	99,90
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.380.000	23.368.000	99,95
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.750.000	116.519.120	98,95
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000	97.986.100	97,99
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	97.986.100	97,99
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.618.892.820	4.384.796.165	94,93
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.618.892.820	4.384.796.165	94,93
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334.648.130	277.250.296	82,85
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.000.000	73.391.264	69,24
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	226.923.130	202.139.032	89,08

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.725.000	1.720.000	99,71
	Urusan Pilihan Perindustrian		429.756.200	130.819.938	30,44
		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	139.290.000	125.639.938	90,20
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	139.290.000	125.639.938	90,20
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUK) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	290.466.200	5.180.000	1,78
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Inform	198.066.800	-	0,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	92.399.400	5.180.000	5,61
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0,00
		Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	-	-	0,00
	Urusan Pilihan Transmigrasi		-	-	0,00
		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-	-	0,00
		Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	-	-	0,00

Sumber: Disnakerintrans 2021

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

a. Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenagakerjaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, maka penyusunan capaian kinerja urusan Ketenagakerjaan harus memperhatikan target SPM yang sudah ditetapkan. Target Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2016. Lima pelayanan dasar Bidang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Pelatihan Kerja, indikator SPM: besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, target tahun 2018 adalah 53%; besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, target tahun 2018 adalah 71%.
2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, indikator SPM: besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, target tahun 2018 adalah mencapai 49,24%.
3. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, indikator SPM adalah besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), target sampai tahun 2018 adalah 100%
4. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek, indikator SPM: besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek, target tahun 2018 adalah mencapai 50%.

Perlu disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, dirubah dengan Permenakertrans Nomor 2 tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tentang Ketenagakerjaan

b. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Wajib Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian

Permendagri Nomor 73 Tahun 2010 tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Ketransmigrasian ditetapkan 3 (tiga), yaitu:

Urusan Ketenagakerjaan:

1. Pelayanan kepesertaan Jaminan sosial bagi pekerja/ buruh, capaian kinerja 72,37% dengan rumusan perbandingan Jumlah pekerja / buruh

peserta program jamsostek aktif dengan Jumlah pekerja / buruh dikali 100%.

2. Pencari Kerja Yang Ditempatkan, capaian kinerja sebesar 63,78% dengan rumusan jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan dengan jumlah Pencari Kerja yang mendaftar dikali 100%.

Urusan Ketrasmigrasian: Transmigrasi Swakarsa capaian kinerja 0% dengan rumusan jumlah Transmigran Swakarsa dibanding dengan jumlah Transmigran dikali 100.

1.1 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

Permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dalam upaya pengembangan pelayanan Ketenagakerjaan, Perindustrian, dan Transmigrasi, yang didasarkan pada fungsi bidang pelayanan dijelaskan sebagai berikut :

1. Permasalahan terkait urusan ketenagakerjaan
 - a. Angka pengangguran masih cukup tinggi dengan perkembangan lapangan pekerjaan yang terbatas;
 - b. Informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya dipahami masyarakat;
 - c. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan SD kebawah sebesar 278.098 orang atau 65,50% di tahun 2018;
 - d. Identifikasi Kebutuhan pelatihan belum dapat dilakukan dengan baik;
 - e. Masih lemahnya kelembagaan hubungan industrial;
 - f. Pembinaan dan Sosialisasi Kebijakan Ketenagakerjaan masih kurang;
 - g. Pembinaan dan sosialisasi dari mediator hubungan Industrial untuk program jamsostek Tenaga Kerja Luar Hubungan kerja masih kurang;
 - h. Belum tersedianya data mengenai produktivitas usaha marginal dan kondisi pasar kerja yang valid.
2. Permasalahan terkait urusan perindustrian
 - a. Hambatan peningkatan efisiensi produksi,

- b. Pengusaha Industri Kecil Menengah lebih memprioritaskan pada aspek produksi, sedangkan aspek pemasaran, keuangan, dan aspek manajemen masih sangat kurang.
- c. Industri Kecil Menengah masih lemah dalam inovasi desain produk.
- d. Kemitraan usaha dan jaringan pemasaran masih terbatas.
- e. Belum optimalnya pengembangan industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri
- f. Terbatasnya dukungan infrastruktur pendukung sarana prasarana teknis dan kondisi mesin yang sudah tua
- g. Daya saing masih rendah, pengetahuan dan keterampilan pelaku industri masih terbatas.

3. Permasalahan terkait urusan transmigrasi

Jumlah animo transmigrasi tidak sebanding dengan target/ kuota yang diberikan dari Pusat (Kemenakertrans RI). Tingkat penempatan transmigrasi masih sangat rendah, diantaranya karena keterbatasan lokasi transmigrasi dan kuota transmigrasi ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Rendahnya kualitas calon transmigran dan kurangnya penguasaan informasi terhadap calon lokasi transmigrasi.

b. Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan pekuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik dari isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa depan. Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2021 disusun berdasarkan beberapa sumber, **pertama** berdasarkan pada permasalahan dan isu strategis Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, **kedua** berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian di Kabupaten Wonosobo, **ketiga** bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo

(RPJPD) dan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 -2021, dan **keempat** didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan urusan ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian, sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2017 – 2021.

Penentuan isu strategis didahului dengan *review* terhadap kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan regional, dan daerah yang relevan dalam memberi arah pembangunan ketenagakerjaan, perindustrian, dan ketransmigrasian di Kabupaten Wonosobo. Hasil *review* akan melengkapi draft isu strategis Urusan Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Ketransmigrasian.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi isu - isu strategis urusan ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian Kabupaten Wonosobo, sebagai berikut:

1. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia, tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;
2. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
3. Kualitas pelayanan penempatan tenaga kerja yang belum sepenuhnya berorientasi pada kepuasan pelanggan;
4. Tata kelola pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja yang masih memerlukan perbaikan;
5. Rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
6. Lemahnya kemampuan IKM dalam aspek pemasaran, keuangan, dan manajemen;
7. Pelaku IKM masih lemah dalam menjaga kualitas produk, inovasi dan pengembangan desain kemasan dan produk;
8. Lemahnya jaringan kemitraan dengan industri besar dan perbankan;
9. Daya saing masih rendah, pengetahuan dan keterampilan pelaku industri masih terbatas; dan
10. Terbatasnya alokasi penempatan transmigrasi tidak sebanding dengan animo masyarakat.

1.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo tahun 2023 disusun telah berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Sehingga tidak ada perubahan dalam Program-Kegiatan maupun

besaran anggaran. Urusan wajib Ketenagakerjaan terdiri dari empat program dan 26 kegiatan, Urusan Pilihan Ketransmigrasian terdiri dari satu program dan satu kegiatan. Urusan pilihan Perindustrian terdiri dari tiga program dan dua puluh kegiatan, serta didukung dengan dua program pendukung untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

1.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui musrenbang mulai dari musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2022 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo telah diakomodir dalam program kegiatan dalam Renja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2022.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra. Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan (a-spatial). Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan: **pertama** berdasarkan pada rencana strategis Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, **kedua** Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 - 2025, **ketiga** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 - 2026, **keempat** Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 - 2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2023

Selaras dengan misi pembangunan Kabupaten Wonosobo, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, bidang perindustrian, dan bidang transmigrasi, diharapkan memberi kontribusi pada upaya pencapaian misi kedua yaitu “Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata, dan koperasi” serta fokus pada program unggulan “Wonosobo Sehat” dan “Wonosobo Pinter”.

Misi kedua, yaitu meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata, dan koperasi bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan. Kontribusi yang diharapkan dalam pencapaian misi ini, diarahkan pada upaya pencapaian sasaran meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan kerja dan meningkatnya kuantitas industri pengolahan dan kualitas produk, melalui strategi menciptakan peluang kerja dan daya saing tenaga kerja dan meningkatkan produksi dan produktivitas IKM. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi mendukung program unggulan Wonosobo sehat melalui peningkatan standarisasi dan sertifikat halal untuk industri pengolahan dalam rangka mewujudkan

kampung aman dan halal pangan. Sedangkan untuk Wonosobo pintar Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi berkolaborasi dengan BLK komunitas untuk mengembangkan kewirausahaan (entrepreneurship) pesantren serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan melalui pembentukan 100 wirausaha baru terutama rumah tangga miskin.

3.3 Program dan Kegiatan 2023

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo bertugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

Sesuai dengan visi Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021 yaitu “Terwujudnya Wonosobo Bersatu Untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera Untuk Semua”, maka uraian program beserta kegiatan yang dirancang Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

**RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023**

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	- penguatan program link and match dengan dunia industri/dunia usaha melalui peningkatan kompetensi, kualifikasi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja;	Program Perencanaan Tenaga Kerja			20.730.000	APBD	Kab. Wonosozbo	Januari - Desember 2023	20.730.000	24.404.451	Persentase dokumen ketenagakerjaan yang diimplementasikan	1	dokumen
2			Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		20.730.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	20.730.000	24.404.451	Dokumen rencana tenaga kerja daerah	1	dokumen
3				Sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	20.730.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	20.730.000	24.404.451	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	5	perusahaan
4	penguatan program link and match dengan dunia industri/dunia usaha melalui peningkatan kompetensi, kualifikasi tenaga	Program Penempatan Tenaga Kerja			420.783.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	420.783.000	249.113.939	Persentase perusahaan yang melakukan kerjasama penempatan tenaga kerja	15	perusahaan

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	kerja sesuai kebutuhan pasar kerja												
5			Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		239.475.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	239.475.000	119.113.939	Persentase kelompok rentan peserta pelatihan yang ditempatkan	100	orang
6				Sub kegiatan Pelayanan antar Kerja	110.821.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	110.821.000	90.000.000	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	800	orang
7	-pembentukan wirausaha baru mandiri melalui pelatihan kewirausahaan dan inkubasi bisnis bagi pemuda, pesantren serta penyandang disabilitas; -perluasan penempatan kerja melalui job fair dan job canvassing.			Sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	128.654.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	128.654.000	29.113.939	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	800	orang
8			Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna		181.308.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	181.308.000	130.000.000	Menurunnya angka kasus penempatan PMI (Pra dan	1	kasus

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota								Purna Penempatan)		
9				Sub kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	100.654.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	100.654.000	45.000.000	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100	oran g
10				Sub kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	80.654.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	80.654.000	85.000.000	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	100	oran g
11	Peningkatan SDM pelaku industri melalui penguasaan teknologi, pelatihan dengan sistem 3 in 1 (pelatihan-sertifikasi kompetensipenempatan kerja);	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja			2.992.132.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	2.992.132.000	959.094.907	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	500	oran g
12	peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja;		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		2.885.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	2.885.000.000	719.321.180	Jumlah paket pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi penyelenggaraan PBK	12	pake t

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
13				Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.785.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	2.785.000.000	401.592.708	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	420	oran g
14				Sub kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	50.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	50.000.000	107.898.177	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	5	rapa t
15				Sub kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	50.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	50.000.000	109.830.295	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1	pake t
			Kegiatan Pembinaan		55.769.000								

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Target	Satuan
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Lembaga Pelatihan Kerja Swasta										
16	pemberdayaan kewirausahaan pesantren melalui BLK komunitas.			Sub kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	55.769.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	55.769.000	100.000.000	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	25	lembaga
17			Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		51.363.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	51.363.000	95.909.491	Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi	100	%
18				Sub kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	51.363.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	51.363.000	95.909.491	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	5	dokumen
19	peningkatan sistem pengawasan perlindungan tenaga kerja; peningkatan sistem pengawasan perlindungan tenaga kerja;	Program Hubungan Industrial			104.191.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	104.191.000	81.348.169	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	100	%

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
20			Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		25.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	25.000.000	20.337.042	Jumlah perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial	200	perusahaan
21				Sub kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	25.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	25.000.000	20.337.042	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	25	dokumen

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
22			Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		79.191.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	79.191.000	61.011.127	Menurunnya jumlah perselisihan	0	kasu s
23			Sub kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah		38.307.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	38.307.000	32.539.268	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5	kasu s
24			Sub kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		40.884.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	40.884.000	28.417.869	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	3	lemb aga

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Target	Satuan
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
25		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi			50.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	50.000.000	55.000.000	Persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman	30	%
26			Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian		50.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	50.000.000	55.000.000	Jumlah Satuan Permukiman yang mencapai tahap kemandirian	30	%
27				Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	50.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	50.000.000	55.000.000	Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	5	Kepala Keluarga
28		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotora			5.700.558.618	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	5.700.558.618		Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik		

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
29			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.629.211.518	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	4.629.211.518	5.010.552.433	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
30				Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.629.211.518	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	4.629.211.518	5.010.552.433	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		
31			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		161.536.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	161.536.000	201.580.000	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
32				Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.695.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	11.695.000	13.800.000	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
33				Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.272.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	20.272.000	24.380.000	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
34				Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.916.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	10.916.000	12.550.000	Tersedianya Barang Cetak dan		

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											Penggandaan		
35				Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.339.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	2.339.000	3.000.000	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
36				Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.314.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	116.314.000	147.850.000	Terselenggara nya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
37			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		35.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	35.000.000	90.000.000	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
38				Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	35.000.000	90.000.000	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
39			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		337.720.100	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	337.720.100	295.335.000	Terlaksanya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											Daerah		
40				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.559.400	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	1.559.400	1.725.000	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		
41				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.447.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	90.447.000	106.050.000	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
42				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.052.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	21.052.000	25.000.000	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
43				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	224.661.700	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	224.661.700	162.560.000	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		
44			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		531.091.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	531.091.000	526.600.000	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
45				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas atau Operasional	65.633.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	65.633.000	73.500.000	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas atau Operasional		
46				Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.458.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	9.458.000	3.000.000	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
47				Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	450.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	450.000.000	150.000.000	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
48			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi		6.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	6.000.000	9.050.000	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi		
49				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	3.000.000	3.900.000	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat		

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											Daerah		
50				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	3.000.000	5.150.000	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
51		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri			8.120.769.300	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	8.120.769.300	414.291.092	Persentase dokumen rencana pembangunan industri yang diimplementasikan	70	%
52			Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	8.120.769.300	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	8.120.769.300	414.291.092	Persentase Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	70	%	
53				Sub kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	8.050.769.300	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	8.050.769.300	0	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan	1	dokumen
54	peningkatan nilai tambah produk melalui diversifikasi produk dan hilirisasi industri pengolahan pangan			Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan,	30.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	30.000.000	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi	2	pelatihan

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Target	Satuan
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	berbahan baku lokal;			Penyebaran dan Perwilayahan Industri							dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		
55	optimalisasi jejaring industri pengolahan melalui pembentukan klaster industri.			Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	40.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	40.000.000	0	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5	dokumen

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Target	Satuan
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
56	Peningkatan kualitas dan daya saing produk industri pengolahan pangan berbahan baku lokal melalui standarisasi/sertifikasi produk dan penerapan teknologi/inovasi produk;	Program Pengendalian Izin Usaha Industri			87.153.800	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	87.153.800	20.337.042	Persentase industri pengolahan yang mempunyai izin usaha	25	%
57	- Fasilitasi sertifikasi halal untuk mendukung pengembangan Kampung Aman dan Halal Pangan		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri		87.153.800	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	87.153.800	20.337.042	Persentase jumlah usaha industri yang berijin	25	%

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Nasional (SIINAS)										
58				Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	70.000.000	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	70.000.000	20.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	15	dokumen

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
59				Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	17.153.800	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	17.153.800	6.337.042	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	5	dokumen

	Prioritas Kabupaten	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Dana	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Sub Kegiatan	Anggaran n+1 Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan		
											Tolok Ukur	Tar get	Satu an
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
60		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional			22.884.600	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	22.884.600	100.000.000	Persentase industri kecil menengah yang terdata di database industri kecil menengah (IKM) Kabupaten	75 %	
61			Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		22.884.600	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	22.884.600	100.000.000	Cakupan penyediaan informasi industri	1	doku men
62				Sub kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	22.884.600	APBD	Kab. Wonosobo	Januari - Desember 2023	22.884.600	100.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	3	doku men

BAB IV

PENUTUP

Dalam pelaksanaan kebijaksanaan, program dan kegiatan yang diarahkan pada sasaran dan tujuan dengan mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo. Rencana Kerja tahun 2023 harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, baik untuk kegiatan administrasi umum yang bersifat rutin maupun kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 dan juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo

Demikian Rencana Kerja Tahun 2023 ini disusun, semoga dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo di bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian serta mampu menyajikan kinerja yang lebih optimal.